

KIC  
012.04  
11.04  
2

AB

POVERTY

GOVERNMENT LIABILITY

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI PERKOTAAN (P2KP)**

**(Studi Deskriptif Tentang Faktor-faktor yang Mendukung dan  
Menghambat Implementasi Kebijakan P2KP di Wilayah Kota Surabaya)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**ALIDA MARDIANA**

**NIM : 079815760**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI PERKOTAAN (P2KP)**

**(Studi Deskriptif Tentang Faktor-faktor yang Mendukung dan  
Menghambat Implementasi Kebijakan P2KP di Wilayah Kota Surabaya)**

**S K R I P S I**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar S-1**



**OLEH:**

**ALIDA MARDIANA**

**NIM : 079815760**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

## Lembar Persetujuan

Surabaya, ..... 22 Desember 2003 .....

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Dra. SITI AMINAH, MA

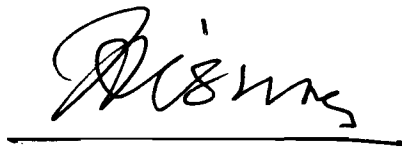
NIP. 131836624

## Lembar Pengesahan

Telah diujikan pada tanggal 5 Januari 2004

Oleh Tim Penguji

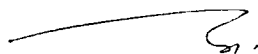
Ketua



Drs. Wisnu Pramutanto, MSi

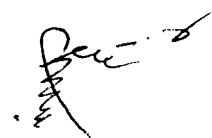
NIP. 131453124

Anggota



Dra. Siti Aminah, MA

NIP. 131836624



Drs. Haryadi, MSi

NIP. 131653466

Universitas Airlangga  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Politik  
Surabaya, 2004

## ABSTRAK

Nama : Alida Mardiana  
NPM : 079815760  
Judul : Implementasi Kebijakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)  
Kepustakaan : Literatur (1987-2001), textbook 13 eksemplar, surat kabar 1 eksemplar, majalah 2 eksemplar, makalah 2 eksemplar.  
Jumlah Halaman : 203 Halaman (lembar judul, persetujuan, pengesahan dan persembahan 4 halaman, abstrak 2 halaman, kata pengantar 2 halaman, daftar isi 5 halaman, tabel 1 halaman dan bagan 1 halaman, isi 143 halaman, daftar pustaka 2 halaman, lampiran 43 halaman)

Implementasi Kebijakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) diangkat sebagai judul skripsi ini karena penulis yakin bahwa dalam implementasi sebuah produk kebijakan pemerintah banyak ditemui faktor-faktor pendukung maupun penghambat jalannya kebijakan di tengah masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Tahap I di wilayah Kota Surabaya dan faktor politis apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Tahap I di wilayah Surabaya. Penulis menjawab kedua permasalahan diatas dengan cara mengikuti proses implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Tahap I di wilayah Kota Surabaya, dan mengidentifikasi faktor-faktor politis dan teknis yang menghambat maupun mendukung implementasinya. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan pengumpulan data dokumen. Penentuan informan ditentukan atas pertimbangan keterlibatannya dalam implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang diamati sebagai sampel. Kerangka dasar berpikir yang digunakan dalam menganalisa masalah adalah konsep kebijakan publik dan konflik. Dalam praktiknya, P2KP tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi. Faktor-faktor itu bisa diidentifikasi sebagai faktor teknis maupun faktor politis. Faktor politis yang paling banyak

berpengaruh dalam implementasi P2KP adalah konflik. Konflik yang berkembang dalam implementasi P2KP terjadi antara pihak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), pihak Kecamatan, pihak Kelurahan, dan masyarakat sebagai pemetik manfaat P2KP. Konflik itu sangat mempengaruhi kinerja BKM sebagai sarana pemberdayaan masyarakat miskin yang dijadikan sasaran, apalagi P2KP tidak dibarengi dengan sosialisasi yang cukup dan penguatan institusi lokal. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi P2KP tidak lebih dari kebijakan tambal sulam yang diambil oleh Pemerintah tanpa dibarengi oleh kesiapan dan penguatan institusi lokal sebagai awal terbentuknya BKM dan sebagai pijakan utama terlaksananya proyek ini.